KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Pemimpin DPR disarankan tak rangkap jabatan di partai
Tanggal : Jumat, 17 Mei 2019
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 18

Pemimpin DPR Disarankan Tak Rangkap Jabatan di Partai

Formappi berharap partai mengusulkan kandidat pemimpin DPR yang berintegritas dan bersih.

TEMPO/SUBEKTI



Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 8 Mei lalu.

Maya Ayu Puspitasari
Maya.puspitasari@tempo.co.id

JAKARTA – Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mengusulkan sejumlah kriteria calon pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019-2024. Kriteria itu, antara lain, adalah memahami tugas dan fungsi DPR, tidak rangkap jabatan di elite partainya, dan berintegritas. "Dia harus bisa menerjemahkan tugas dan fungsi itu dalam berkomunikasi dengan rakyat," kata Lucius, kemarin.

Lucius mengusulkan sejumlah kriteria ini menyusul wacana sejumlah partai, yang diprediksi masuk lima besar pemenang pemilu anggota legislatif, yang sudah mendengungkan kandidat pemimpin DPR dari partainya. Wacana dini itu dilontarkan karena posisi ketua dan empat wakil ketua DPR sudah pasti milik lima besar partai pemenang pemilu. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 427 D ayat 1 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3).

Di lingkup internal PDI Perjuangan mengemuka nama Puan Maharani—Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sekaligus putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri—sebagai kandidat ketua DPR. Lalu di Demokrat, muncul nama Edhie Baskoro Yudhoyono—putra Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Adapun Gerindra berencana mengusulkan kembali Fadli Zon, Wakil Ketua DPR periode 2014-2019.

Menurut Lucius, calon pemimpin DPR yang akan diusulkan partai seharusnya tidak menduduki jabatan elite di partainya agar mereka bisa berfokus mengerjakan tugasnya di parlemen. Di samping itu, pemimpin DPR tersebut bisa memastikan lembaga Dewan berjalan sesuai dengan fungsinya. "Figur yang pas tentulah orang yang punya kapasitas memimpin, selain *skill* manajerial yang bisa membantu tata kelola lembaga untuk menjadi kuat dan fungsional," kata dia.

Ia juga meminta agar partai-partai berkaca pada DPR periode 2014-2019, yang sering kali bongkar-pasang posisi pemimpin. Selain itu, dua pemimpin DPR periode ini juga tersangkut perkara korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu Setya Novanto—Ketua DPR dari Golkar—dan Taufik Kurniawan—Wakil Ketua DPR dari PAN. Kedua persoalan tersebut sempat menghambat kinerja parlemen serta merusak citra Dewan. "Partai perlu menjamin kader pilihannya bisa membangun sistem kerja yang efektif dan mengembalikan citra baik DPR," ujar Lucius.

Di balik kriteria itu, Lucius tetap pesimistis citra DPR dapat terangkat karena kandidat pemimpin parlemen dikembalikan kepada lima besar partai pemenang pemilu, sesuai dengan UU MD3. "Akhirnya rakyat hanya bisa menerima figur yang ditunjuk partai, betapapun figur itu hanya mengandalkan dinasti politik atau kedekatan dengan elite partai," kata dia.

Direktur Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif, Veri Junaidi, berpendapat sama dengan Lucius. Ia berharap semua partai berkomitmen untuk mendorong kader yang bersih, berintegritas, dan mampu mengkonsolidasikan berbagai kepentingan di DPR, untuk menjadi pemimpin parlemen. Namun ia pesimistis karena pemilihan kandidat pemimpin DPR di masing-masing partai terkesan berorientasi pada dinasti politik. "Jika dilihat nama-nama yang diusulkan, orientasinya memang tidak untuk memilih pemimpin DPR berdasarkan kriteria ideal, tapi berdasarkan kepentingan politik partai untuk mengusung putra mahkota masing-masing," ujar dia.

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di DPR, Bambang Wuryanto, mengatakan bukan hal yang aneh apabila ketua umum partai ingin mewariskan kekuasaan kepada orang terdekatnya. Tapi, kata dia, syaratnya kader yang menerima warisan politik itu memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk diberi tanggung jawab. "Di PDI Perjuangan tidak ada yang sebanding dengan Puan. Jadi, siapa lagi yang mumpuni untuk posisi ketua DPR?" kata Bambang.

● | ARKHELAUS WISNU